



INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

**LAPORAN HASIL EVALUASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH PADA DINAS
PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

**NOMOR : R/700.1.2.7/88/ITDA/LHE/08/2024
TANGGAL : 28 AGUSTUS 2024**



INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

LAPORAN HASIL EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

**NOMOR : R/700.1.2.7/88/ITDA/LHE/08/2024
TANGGAL : 28 AGUSTUS 2024**



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Raja Haji Fisabilillah Nomor 1, Tarempa, Kepulauan Anambas, Kode Pos 29791,
Pos – el inspektoratkabkepanambas@gmail.com

Tarempa, 28 Agustus 2024

Nomor : R/700.1.2.7/8⁴ /ITDA/LHE/08/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Yth. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
di
Tarempa

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024, dengan urutan pembahasan sebagai berikut:

- **IKHTISAR EKSEKUTIF**
- **Bab I Pendahuluan**
 - a. Dasar Hukum Evaluasi
 - b. Latar Belakang
 - c. Tujuan Evaluasi
 - d. Ruang Lingkup Evaluasi
 - e. Metodologi Evaluasi
 - f. Gambaran Umum Evaluatan
 - g. Gambaran Umum Implementasi SAKIP
 - h. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya
- **Bab II Hasil Evaluasi**
 - a. Evaluasi Atas Perencanaan Kinerja
 - b. Evaluasi Atas Pengukuran Kinerja
 - c. Evaluasi Atas Pelaporan Kinerja
 - d. Evaluasi Atas Evaluasi Internal
 - e. Rekomendasi Evaluasi Tahun 2024
- **LAMPIRAN**

IKHTISAR EKSEKUTIF

Secara umum pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP Perangkat Daerah difokuskan pada kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP tahun sebelumnya. Evaluasi atas implementasi SAKIP terdiri atas evaluasi penerapan komponen manajemen kinerja yang meliputi: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja dan isu-isu penting yang ingin diungkap melalui evaluasi atas implementasi SAKIP adalah sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah dalam menyusun, mereviu dan menyempurnakan perencanaan kinerja berfokus pada hasil;
2. Pembangunan sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerja;
3. Pengungkapan informasi pencapaian kinerja;
4. Monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan program, khususnya program strategis;
5. Keterkaitan diantara seluruh komponen-komponen perencanaan kinerja dengan penganggaran, kebijakan pelaksanaan dan pengendalian serta pelaporannya;
6. Capaian kinerja utama dari masing-masing Perangkat Daerah;
7. Tingkat implementasi SAKIP Perangkat Daerah;
8. Memastikan disusunnya rencana aksi terhadap rekomendasi hasil evaluasi yang belum ditindaklanjuti.

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja yang meliputi, Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Internal, dapat disimpulkan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas memperoleh nilai **65,10** dengan kategori peringkat **B** yaitu **Baik**.

Terhadap permasalahan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2024, kami merekomendasikan kepada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas beserta seluruh jajarannya agar melakukan perbaikan sebagai berikut:

1. Melakukan penyelarasan indikator antara Rentra, Renja, IKU dan Dokumen Perjanjian Kinerja;
2. Menetapkan Perjanjian Kinerja kepada seluruh pegawai dan staff;
3. Melakukan pengukuran kinerja secara berkala;
4. Menyusun Pedoman Teknis evaluasi kinerja internal;

5. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait pengukuran kinerja;
6. Menyusun Laporan Kinerja sesuai dengan pedoman yang berlaku;
7. Memanfaatkan dan menindaklanjuti laporan hasil evaluasi AKIP sebagai peningkatan Kinerja pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Demikian laporan ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Inspektur Daerah,



YUNIZAR SE., M.P
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197006231998031009

DAFTAR ISI

IKHTISAR	1
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	
A. Dasar Hukum evaluasi	4
B. Latar Belakang	4
C. Tujuan Evaluasi	5
D. Ruang lingkup Evaluasi	5
E. Metodologi Evaluasi	5
F. Gambaran Umum Evaluatan	6
G. Gambaran Umum Implementasi SAKIP	6
H. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya	6
BAB II HASIL EVALUASI	
A. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja	8
B. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja	8
C. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja	9
D. Evaluasi atas Evaluasi Internal	9
E. Rekomendasi Evaluasi Tahun 2024	10
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Permenpan dan RB Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Permenpan Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2024;
6. Surat Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor : 800.1.11.1/185/Itda.ST/07/2024 tanggal 29 Juli 2024.

B. Latar Belakang

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dalam Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)-nya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah di pusat dan daerah untuk secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya demi mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansinya sesuai yang diamanahkan dalam RPJMD, RENSTRA, IKU, RENJA, RKT dan Perjanjian Kinerja.

C. Tujuan Evaluasi

Adapun tujuan dari pelaksanaan evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/Perangkat Daerah adalah untuk:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP.
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP.
4. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal serta pencapaian kinerja. Informasi kinerja yang dipertanggungjawabkan dalam laporan kinerja bukanlah satu-satunya yang digunakan dalam menentukan nilai dalam evaluasi, akan tetapi juga termasuk berbagai hal (*knowledge*) yang dapat dihimpun guna mengukur keberhasilan ataupun keunggulan instansi.

Dalam penerapannya, lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP mencakup:

1. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja, dan sistem pengukuran kinerja;
2. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja;
3. Evaluasi terhadap program dan kegiatan; dan
4. Evaluasi terhadap kebijakan instansi/unit kerja yang bersangkutan.

E. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi atas implementasi SAKIP adalah metodologi yang pragmatis karena disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah pragmatis ini diambil agar dapat lebih cepat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP dan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pelaksanaan evaluasi digunakan **Evaluasi Sederhana** (*desk evaluation*) yaitu evaluasi dilakukan di kantor tanpa menguji kebenaran dan pembuktian dilapangan, revidu, dan telaahan atas SAKIP (revidu dokumen Renstra dan Laporan Kinerja) yang ditambah dengan **Wawancara** yaitu mengumpulkan data dan informasi yang dilakukan dengan

mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden dan jawaban yang diterima dari responden dicatat secara langsung.

F. Gambaran Umum Evaluatan

Dalam kedudukannya sebagai perangkat daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 36 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang perpustakaan dan kearsipan;
2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di perpustakaan dan kearsipan;
3. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan DISPUSIPDA;
4. Koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
5. Pengelolaan barang milik daerah;
6. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan DISPUSIPDA; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

G. Gambaran Umum Implementasi SAKIP

Implementasi SAKIP pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas telah dilaksanakan dengan menetapkan IKU dan telah menetapkan perjanjian kinerja pada tahun 2024 beserta turunan perjanjian kinerja pada Eselon III dan Eselon IV. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas juga telah membuat Laporan Kinerja (LKjIP) Tahun 2023.

H. Tindak lanjut Hasil evaluasi Tahun Sebelumnya

Adapun berdasarkan analisa yang dilakukan terhadap pelaksanaan rekomendasi evaluasi tahun yang lalu, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sudah menindaklanjuti semua hasil evaluasi tahun sebelumnya,

BAB II

HASIL EVALUASI

Secara umum Hasil Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja yang meliputi : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Internal.

Hasil Evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan Kisaran 0% sampai dengan 100%, yang selanjutnya diberikan “ Kategori Peringkat “ untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut :

No	Kategori Peringkat	Nilai Persen	Interprestasi
1.	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
2.	A	>80-90	Memuaskan Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel.
3.	BB	>70-80	Sangat Baik , Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang handal.
4.	B	>60-70	Baik , Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan.
5.	CC	>50-60	Cukup (memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6.	C	30-50	Kurang , sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perlu perbaikan yang mendasar.
7.	D	0-30	Sangat Kurang , sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; perlu perbaikan, yang mendasar.

Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai 0 s.d 100. Berdasarkan hasil evaluasi kami, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas **memperoleh nilai sebesar 65.10** dengan kategori **B (Baik)**.

Nilai sebagaimana tersebut merupakan akumulasi terhadap penggabungan 4 komponen manajemen Kinerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang di evaluasi dengan rincian sebagai berikut :

Komponen	Bobot Nilai (%)	Nilai Hasil Evaluasi
a. Perencanaan Kinerja	30.00	19,50
b. Pengukuran Kinerja	30.00	20,10
c. Pelaporan Kinerja	15.00	9,75
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25.00	15,75
Total	100.00	65,10

Adapun uraian hasil evaluasi atas masing-masing komponen manajemen kinerja tersebut diatas adalah sebagai berikut :

A. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Evaluasi atas kinerja mencakup 3 (tiga) sub komponen dengan jumlah kriteria sebanyak 24 kriteria. Capaian pemenuhan indikator Perencanaan Kinerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 **memperoleh nilai evaluasi 19,50** dari bobot nilai 30, yang terdiri atas capaian :

1. Kelengkapan Dokumen Perencanaan kinerja dengan nilai 4,2 dari nilai maksimal 6,00;
2. Kualitas Dokumen Perencanaan kinerja dengan nilai 6,3 dari nilai maksimal 9,00;
3. Pemanfaatan Dokumen perencanaan kinerja dengan nilai 9 dari nilai maksimal 15,00.

Hasil evaluasi atas 25 kriteria yang telah ditetapkan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Terdapat tidak keselarasan antara Renstra, Renja, IKU dan Perjanjian Kinerja;
2. Perjanjian kinerja ditetapkan pada level eselon II/III/IV belum sampai pada Staff;
3. Kualitas Rumusan Hasil belum sepenuhnya menggambarkan Kondisi Kinerja yang akan dicapai (Tidak selaras antara Renstra, Renja dan IKU);dan
4. Indikator Kinerja Utama Belum sepenuhnya menggambarkan Kondisi Kinerja Utama;

B. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas komponen Pengukuran Kinerja mencakup 3 (tiga) sub komponen dengan jumlah kriteria penilaian sebanyak 19 indikator, yaitu Pemenuhan Pengukuran (3 kriteria), Kualitas Pengukuran (7 kriteria), dan Implementasi Pengukuran (10 kriteria). Capaian nilai pengukuran kinerja adalah sebesar 20,1 dari nilai maksimal 30,00, terdiri atas :

1. Pemenuhan Pengukuran sebesar 4,2 dari nilai maksimal 6,00

2. Kualitas Pengukuran sebesar 5,4 dari nilai maksimal 9,00
3. Implementasi Pengukuran sebesar 10,5 dari nilai maksimal 15,00

Dari hasil evaluasi atas Pengukuran Kinerja masih terdapat kelemahan sebagai berikut :

1. Mekanisme pengumpulan data kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan;
2. Pengukuran capaian kinerja belum memanfaatkan teknologi informasi;
3. pengukuran kinerja belum mempengaruhi strategi dalam mencapai kinerja; dan
4. Pengukuran kinerja belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi informasi.

C. Evaluasi Atas Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas komponen Pelaporan Kinerja mencakup 3 (tiga) sub komponen dengan jumlah kriteria penilaian sebanyak 16 kriteria yaitu Pemenuhan Pelaporan (6 kriteria), Kualitas pelaporan (9 kriteria), dan Pemanfaatan pelaporan kinerja (7 kriteria). Capaian Indikator Pelaporan Kinerja mendapat poin sebesar 9,75 dari nilai maksimal 15,00 terdiri atas :

1. Pemenuhan Pelaporan 2,1 dari nilai maksimal 3,00
2. Kualitas Pelaporan Kinerja 3,15 dari nilai maksimal 4,50
3. Pemanfaatan pelaporan Kinerja 4,5 dari nilai maksimal 7,50

Adapun dokumen yang dievaluasi pada komponen ini adalah LAKIP Tahun 2023. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas telah menyusun LAKIP Tahun 2023, namun dari hasil evaluasi dokumen LAKIP tersebut, masih terdapat kelemahan-kelemahan yang belum memenuhi kriteria yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Informasi laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya; dan
2. Informasi laporan kinerja belum mempengaruhi budaya kinerja organisasi.

D. Evaluasi atas Evaluasi Internal

Komponen Evaluasi Internal mencakup 3 (tiga) sub komponen dengan jumlah kriteria penilaian sebanyak 3 (tiga) kriteria yaitu Pemenuhan Evaluasi (3 kriteria), Kualitas Evaluasi (5 kriteria) dan Pemanfaatan Evaluasi (5 kriteria). Capaian indikator evaluasi internal adalah 15,75 dari nilai maksimal 25,00 terdiri atas :

1. Pemenuhan Evaluasi 2,5 dari nilai maksimal 5,00
2. Kualitas Evaluasi 4,5 dari nilai maksimal 7,50
3. Pemanfaatan Evaluasi 8,75 dari nilai maksimal 12,50

Hasil evaluasi internal rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal sudah ditindaklanjuti.

E. Rekomendasi

Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan diatas, kami merekomendasikan kepada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas beserta seluruh jajarannya agar dilakukan perbaikan sebagai berikut:

1. Melakukan penyelarasan indikator antara Rentra, Renja, IKU dan Dokumen Perjanjian Kinerja;
2. Menetapkan Perjanjian Kinerja kepada seluruh pegawai dan staff;
3. Melakukan pengukuran kinerja secara berkala;
4. Menyusun Pedoman Teknis evaluasi kinerja internal;
5. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait pengukuran kinerja;
6. Menyusun Laporan Kinerja sesuai dengan pedoman yang berlaku;
7. Memanfaatkan dan menindaklanjuti laporan hasil evaluasi AKIP sebagai peningkatan Kinerja pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Demikian laporan ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Inspektur Daerah,

YUNIZAR SE, M.P.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197006231998031009



Tembusan:

- Bupati Kepulauan Anambas.

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit/Satker	
			Jawaban	Nilai
1	PERENCANAAN KINERJA	30.00		19.5
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6.00	B	4.2
Kriteria:				
1	Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja.			
2	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang.			
3	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah.			
4	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek.			
5	Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja.			
6	Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.			
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9.00	B	6.3
Kriteria:				
1	Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan.			
2	Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu.			
3	Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai.			
4	Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.			
5	Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART.			
6	Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis).			
7	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis.			
8	Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta			
9	Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan			
10	Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.			
11	Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.			
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15.00	CC	9
Kriteria:				
1	Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai.			
2	Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai.			
3	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih <i>on the right track</i> .			
3	Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala.			
4	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya.			
5	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik.			
6	Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.			
7	Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.			

2	PENGUKURAN KINERJA	30.00		20.1
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6.00	B	4.2
1	Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.			
2	Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja.			
3	Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.			
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9.00	CC	5.4
1	Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja.			
2	Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.			
3	Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan.			
4	Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala.			
5	Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.			
6	Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).			
7	Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).			
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15.00	B	10.5
1	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.			
2	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional.			
3	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi.			
4	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja.			
5	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja.			
6	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja.			
7	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja.			
8	Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.			
9	Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.			
10	Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.			
3	PELAPORAN KINERJA	15.00		9.75
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3.00	B	2.1
1	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun.			
2	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala.			
3	Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan.			
4	Dokumen Laporan Kinerja telah direvisi.			
5	Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan.			
6	Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu.			
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya	4.50	B	3.15
1	Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar.			
2	Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja.			
3	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan.			
4	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah.			
5	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.			
6	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).			

7	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.			
8	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.			
9	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).			
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7.50	CC	4.5
1	Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab).			
2	Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai.			
3	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.			
4	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.			
5	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.			
6	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.			
7	Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.			
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25.00		15.75
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5.00	C	2.5
1	Terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.			
2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.			
3	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.			
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7.50	CC	4.5
1	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar.			
2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai.			
3	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai.			
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.			
5	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).			
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12.50	B	8.75
1	Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti.			
2	Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi			
3	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.			
4	Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.			
5	Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.			